

**IMPLEMENTASI PENYERAHAN PROTOKOL
NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DI KOTA PADANG**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

OLEH

AUDYNA MONTI

NIM : 2020122007



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

IMPLEMENTASI PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA PADANG

(Audyna Monti, 2020122007, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, Pembimbing Dr. Azmi Fendri, SH.,M.Kn., dan Dr.
Delfiyanti, SH.MH)

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang disertai kewenangan untuk membuat akta sebagai alat bukti yang sempurna bagi yang membutuhkan dalam suatu perbuatan hukum. Namun ada masanya seorang Notaris mengakhiri hak dan kewajibannya dalam menjalankan profesi tersebut. Salah satu di antaranya adalah pada ketika seorang Notaris meninggal dunia. Dalam hal seorang notaris meninggal dunia, protokol notaris tersebut harus tetap terjaga dengan baik sebagai dokumen Negara. Untuk itu, UUJN mewajibkan ahli waris dari notaris yang meninggal dunia menyerahkan kepada Notaris penerima protokol yang ditunjuk melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD). Persoalannya adalah bagaimana proses penyerahan protokol itu untuk kemudian sampai ke tangan notaris penerima. Persoalan yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini, yakni 1) bagaimana implementasi penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di Kota Padang; 2) bagaimana kendala dan upaya dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini diperoleh pemahaman berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa protokol notaris yang meninggal dunia wajib diserahkan oleh ahli waris kepada notaris lain sebagai pemegang protokol melalui MPD. Dalam implementasinya di Kota Padang terungkap, bahwa penyerahan protokol notaris diawali dengan adanya notaris yang meninggal dunia, untuk kemudian ahli warisnya memberitahukan dan menyerahkan protokol kepada MPD Kota Padang, dan seterusnya oleh MPD Kota Padang diproses untuk memperoleh dasar legalitas penunjukan notaris penerima protokol berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam implementasi penyerahan protokol notaris di Kota Padang tidak selamanya berjalan lancar, karena adanya kendala keterlambatan waktu dalam proses penerbitan surat keputusan menteri, sehingga serah terima protokol mengalami keterlambatan sesuai dengan jangka waktu diperkenankan menurut UUJN. Selama keputusan tersebut belum ada, maka notaris penerima tidak dapat menerbitkan salinan akta bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Namun dalam prakteknya di Kota Padang, kendala waktu tersebut dapat diatasi oleh MPD Kota Padang dengan memberikan pengertian kepada para pihak.

Katakunci : Implementasi; Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia; Undang-Undang Jabatan Notaris di Kota Padang;

**THE IMPLEMENTATION OF DELIVERED NOTARY
PROTOCOL DELIVERY BASED ON NOTARY POSITION LAW
IN PADANG CITY**

(Audyna Monti, 2020122007, Notary Masters Study Program, Faculty of Law,
Andalas University, Supervisors: Dr. Azmi Fendri, SH.,M.Kn., and
Dr. Delfiyanti, SH.MH.)

ABSTRACT

A notary is a public official who is entrusted with the authority to make a deed as a perfect evidence for those who need it in a legal act. However, there are times when a Notary ends his rights and obligations in carrying out the profession. One of them is when a Notary dies. In the event that a notary dies, the protocol of the notary must be maintained properly as a state document. For this reason, UUJN requires the heirs of the deceased notary to submit to the Notary the recipient of the protocol appointed through the Regional Supervisory Council (MPD). The problem is how the process of submitting the protocol will then reach the receiving notary. The problems that become problems in this thesis research are 1) how to implement the submission of a protocol for a notary who died in the city of Padang; 2) what are the obstacles and efforts in submitting the protocol of a Notary who died in Padang City. The method used in this study is an empirical legal research method. In this study, an understanding was obtained based on the provisions of Article 63 of Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, which stipulates that the protocol of a notary who dies must be submitted by heirs to another notary as the holder of the protocol through the MPD. In its implementation in Padang City, it was revealed that the submission of a notary protocol begins with the presence of a notary who dies, then his heirs notify and submit the protocol to the Padang City MPD, and so on by the Padang City MPD processed to obtain the legal basis for the appointment of a protocol recipient notary based on a Decree Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. In the implementation of the submission of the notary protocol in the city of Padang, it does not always run smoothly, due to time delays in the process of issuing the ministerial decree, so that the handover of the protocol is delayed according to the time period allowed according to UUJN. As long as the decision has not yet been made, the receiving notary cannot issue a copy of the deed for those who need it. However, in practice in Padang City, the time constraint can be overcome by the Padang City MPD by providing understanding to the parties.

Keywords : Implementation; Protocol of Notary Who Died; Law On The Position Of a Notary In Padang City.